

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu .

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini telah dilakukan. Hampir semua departemen pemerintahan mengeluarkan dana untuk membantu mengurangi kemiskinan. Khususnya mengenai rumah yang tidak layak huni. Salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi rumah yang tidak layak huni adalah memberi dana untuk menjadikan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Desa Lumutan merupakan salah satu desa yang penduduknya tergolong berpenghasilan dibawah rata-rata. Mata pencaharian penduduk Desa Lumutan diantaranya petani, buruh tani, kuli bangunan, karyawan, PNS, wiraswasta dan masih banyak lagi. Kualitas rumah yang di tempati khususnya penduduk yang berpenghasilan rendah masih memprihatinkan diantaranya dinding rumah yang ditempati terbuat dari anyaman bambu, lantai tidak kedap air, tidak memiliki ventilasi yang cukup.

Dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan rumah layak huni, pihak desa masih mengambil keputusan dengan cara subyektif. Sehingga yang seharusnya masih bisa usaha sendiri untuk memperbaiki rumahnya, mempunyai benda berharga seperti sepeda motor, televisi, masih tercantum sebagai salah satu penerima rumah layak huni.

Dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan rumah layak huni ini perlu dilakukan pengolahan data yang tepat agar diharapkan penduduk yang benar-benar membutuhkan bantuan rumah layak huni ini bisa tercapai. Penentuan penduduk yang sebelumnya dilakukan secara manual ini perlu diciptakannya suatu sistem pendukung keputusan yang mampu mengolah data dari kriteria secara efektif sehingga bisa menghasilkan data yang akurat. Tujuan dari sistem pendukung keputusan ini adalah dapat menentukan penduduk yang benar-benar dianggap layak untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni.

Didalam pembuatan penelitian ini penulis menggunakan metode *weighted product* (WP) untuk menyelesaikan masalah tentang pemberian bantuan rumah layak huni. Metode *weighted product* ini menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini memberikan nilai bobot pada setiap kriteria dan selanjutnya dilakukan perangkingan untuk mendapatkan keputusan siapa yang layak mendapatkan bantuan rumah layak huni. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan diatas dalam membuat laporan tugas akhir yang berjudul Sistem Pendukung keputusan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Dengan Menggunakan Metode *Weighted Product* Studi Kasus Desa Lumutan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan Metode *Weighted Product* untuk menentukan siapa yang akan menerima bantuan rumah layak huni ?

2. Berapa tingkat akurasi metode ini untuk memberikan keputusan terhadap seleksi penerimaan bantuan rumah layak huni ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Kriteria penerima bantuan rumah layak huni adalah
 - a. Pekerjaan
 - b. Penghasilan
 - c. Kondisi rumah
 - d. Status kepemilikan tanah
2. Sistem pendukung keputusan yang dibuat hanya menentukan pemberian bantuan rumah layak huni
3. Data yang digunakan adalah data desa lumutan tahun 2016

1.4 Tujuan Penelitian

1. Membangun sebuah sistem pendukung keputusan pemberian renovasi rumah menggunakan Metode *Weighted Product* untuk menentukan calon penerima berdasarkan kriteria serta bobot yang telah ditentukan.
2. Mengukur tingkat akurasi data dalam penerimaan bantuan rumah layak huni.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan hasil yang optimal dan akurat dalam menentukan pemberian bantuan rumah layak huni dibanding proses secara manual.
2. Memberikan kemudahan dalam menentukan penerima bantuan rumah layak huni.